

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi disuatu negara atau daerah merupakan aktivitas dari berbagai macam variabel. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi selalu berkaitan dengan peran manusia dalam pengelolaanya. Karena manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan manusia itu sendiri. Salah satu tujuan terpenting dari pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup mampu untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja karena pertumbuhan angkatan kerja pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Sehingga jika terjadi ketidakseimbangan antara penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja maka yang ada akan menimbulkan pengangguran sehingga berdampak pada ketidakstabilan ekonomi yang berimbas pada ketidakstabilan berbagai bidang kehidupan lainnya.

Mencapai kehidupan masyarakat agar jauh lebih baik lagi sangat dinantikan terjadi dan dijadikan sebagai hal dasar dan titik fokus fondasi pembangunan ekonomi dalam suatu daerah. Tugas yang mendesak seperti pengentasan kemiskinan, menekan laju pengangguran, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai adalah hal yang hendak dikerjakan yang mengarah ke arah pembangunan nasional. Motor penggerak pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia dan sumber daya manusia juga sekaligus manfaat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh karena itu diperlukan peningkatan pemanfaatan peran manusia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan barang dan jasa yang akan diproduksi pada masyarakat bertambah dan meningkatnya kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2004:9). Di dalam pertumbuhan Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk memperoleh pertumbuhan kesejahteraan sosial, yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kemajuan kegiatan ekonomi.

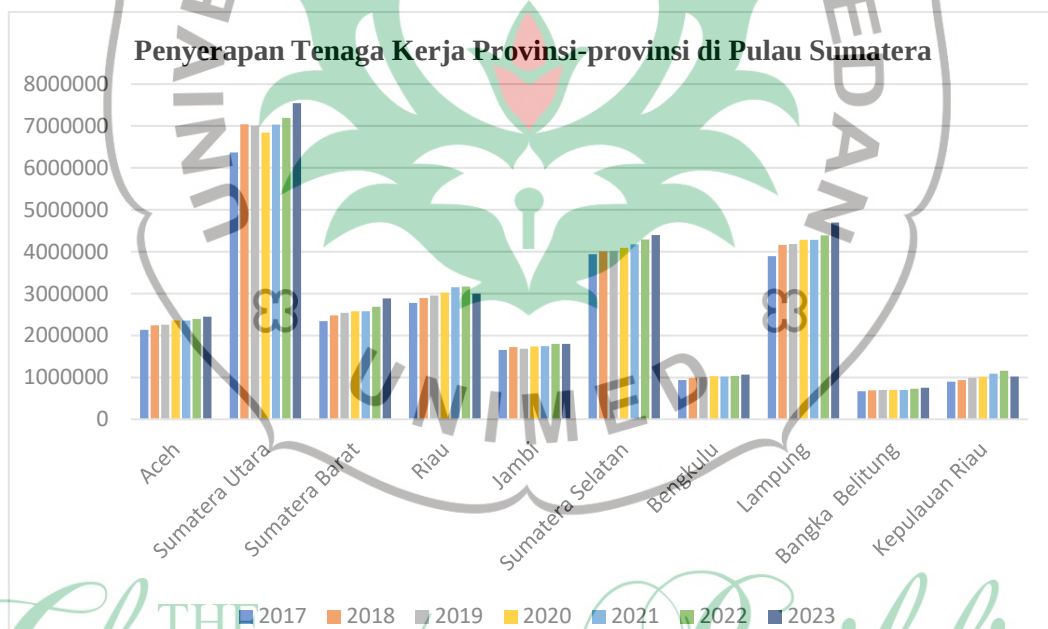
Oleh sebab itu, pembangunan nasional adalah usaha peningkatan taraf sumber daya manusia dan masyarakat yang berkelanjutan yang dilandaskan dengan kemampuan negara dan memanfaatkan kemajuan teknologi serta mengamati berbagai tantangan global. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak dan berkelas dengan memberi perhatian utama agar tercukupinya kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan adalah definisi dari membangun kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi di Indonesia sebenarnya masih sangat banyak menyimpan masalah berbagai bidang terlebih dibidang ketenagakerjaan, yang pada kaitannya tenaga kerja memiliki peran dalam pembangunan nasional karena tenaga kerja adalah faktor produksi. Potensi yang muncul akibat dari tingginya kuantitas dapat digunakan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga produktivitas yang tinggi akan menciptakan nilai tambah produksi dalam pembangunan nasional. Namun permasalahan sebenarnya yang timbul di Indonesia selama ini adalah jumlah penduduk yang tinggi yang di imbangi juga dengan kemampuan dan kualitas yang tinggi, jadi menyebabkan keterbatasan produktivitas dalam kegiatan produksi.

Masalah dari ketenagakerjaan menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi di suatu negara salah satunya adalah Indonesia. Sebagai negara berkembang Indonesia juga tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tercatat oleh BPS yaitu jumlah penduduk Indonesia tahun 2019-2022, BPS menerangkan bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia 266.911,9 jiwa, lalu di tahun 2020 penduduk meningkat menjadi 270.203,9 jiwa, hal yang sama terjadi lagi di tahun 2021 jumlah penduduk meningkat 272.682,5 jiwa dan sampai pada tahun 2022 jumlah penduduk meningkat terus hingga 275.773,8 jiwa. Angkatan kerja adalah bagian dari ketenagakerjaan. Peningkatan angkatan kerja menggambarkan bahwa penawaran tenaga kerja didalam pasar bertambah. Tetapi penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak dipastikan dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut diperlihatkan bahwa masih tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan penduduk apabila jumlah penduduk semakin meningkat maka hal tersebut juga berdampak pada jumlah tenaga kerja yang ikut bertambah, banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan karena ingin memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan hidupnya. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi yang artinya jumlah tenaga kerja usia produktif lebih banyak dibandingkan golongan umur lainnya (BPS, 2018). Namun, tingginya angkatan kerja tersebut tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga pemanfaatan tenaga kerja menjadi tidak mudah untuk dilakukan.

Penyerapan tenaga kerja adalah lapangan pekerjaan yang tersebar luas dan yang sudah terisi yang dilihat dari banyaknya jumlah penduduk bekerja yang terserap di berbagai sektor perekonomian. Penduduk bekerja yang terserap disebabkan oleh adanya permintaan tenaga kerja. Jadi penyerapan tenaga dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja. Akan tetapi hal tersebut dapat menjadi masalah jika penawaran tenaga kerja meningkat dan melebihi dari permintaan tenaga kerja maka hal tersebut menimbulkan masalah di bidang ketenagakerjaan Widiastuti, (2014).



Gambar 1.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2017-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari gambar 1.1 menggambarkan mengenai penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Provinsi yang memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi ada di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 yaitu 7.549.537 jiwa dan penyerapan tenaga kerja terendah yaitu berada pada provinsi Bangka Belitung berjumlah 672.618 jiwa pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena kualitas sumber daya manusia

tenaga kerja di provinsi Bangka Belitung masih rendah karena secara umum penduduk yang bekerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah. Permasalahan tenaga kerja dengan latar belakang SD kebawah secara umum memiliki kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang sangat.

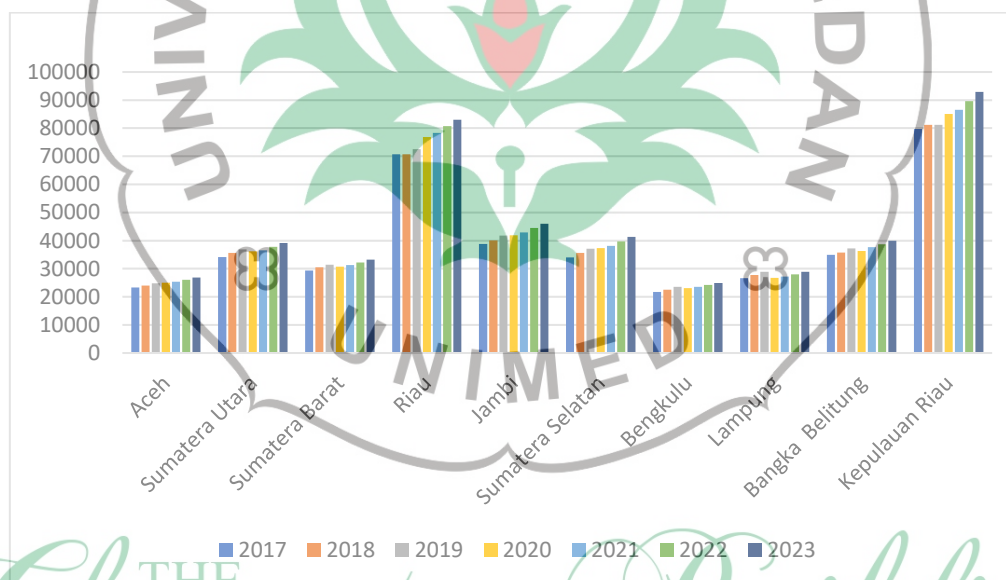
Terdapat faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada suatu daerah, diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut BPS PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja yaitu jika PDRB semakin meningkat maka jumlah penyerapan tenaga kerja juga ikut meningkat. Hal tersebut disebabkan jika output atau penjualan barang dan jasa meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga ikut terserap Feriyanto, (2014).

Namun jika dilihat pada tahun 2020 mengalami penurunan di beberapa Provinsi diantaranya Sumatera Utara dan Bangka Belitung ini disebabkan oleh Covid-19 yang melanda Indonesia di akhir tahun 2019 lalu. Penyakit tersebut melumpuhkan berbagai kegiatan masyarakat termasuk pengurangan tenaga kerja akibat adanya guncangan pertumbuhan ekonomi. Disaat pertumbuhan ekonomi turun maka pada periode yang sama juga terjadi penurunan jumlah tenaga kerja.

Probelematika di Pulau Sumatera salah satunya adalah ketenagakerjaan, salah satu tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang harus diantisipasi karena penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tinggi namun tidak sesuai dengan pendidikannya. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus

yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga dapat memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah PDRB, PDRB dapat mempengaruhi pengurangan jumlah tenaga kerja di suatu wilayah mengalami peningkatan penjualan produk barang dan jasa melalui pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut Keynes dalam Moch Yefri Firmansah (2019).



Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Pulau Sumatera (Ribu Rupiah) Tahun 2017-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB paling rendah dialami oleh provinsi Bengkulu yaitu hanya mencapai 21.751.64 pada tahun 2017 lapangan usaha dan sektor pertanian di provinsi Bengkulu sangatlah banyak namun hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah, banyak potensi nilai tambah dari provinsi Bengkulu yang hilang

dikarenakan kurang berkembangnya industri pengolahan yang mampu menghasilkan barang konsumsi akhir menyebabkan terputusnya rantai ekonomi dari produsen ke konsumen dimana barang mentah atau barang setengah jadi harus di ekspor keluar dari Provinsi Bengkulu agar dapat diproses menjadi barang jadi. Salah satu industri pengolahan yang butuh perhatian khusus dari pemerintah adalah industri logam dan industri percetakan dan reproduksi media rekaman.

Dan pertumbuhan PDRB paling tinggi dialami oleh provinsi Kepulauan Riau yaitu 92.930.2 pada tahun 2023 kondisi tersebut didukung oleh tingginya peran lapangan usaha kategori konstruksi dan kategori perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau meningkat.

Data PDRB diatas adalah berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2017 hingga 2023. Perkembangan PDRB di Pulau Sumatera dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan adanya kenaikan dan mengalami satu kali perlambatan perkembangan pada tahun 2020. Jumlah PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah produksi yang dilakukan di suatu daerah tersebut semakin meningkat sehingga permintaan akan tenaga kerja juga semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya apabila di suatu daerah jumlah produksi yang dilakukan rendah maka permintaan akan tenaga kerja juga sedikit. Pernyataan tersebut didukung oleh temuan Indradeva dan Natha (2015) bahwa besaran PDRB merupakan faktor penting secara positif berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi Pulau Sumatera.

Apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka permintaan terhadap jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, dimana peningkatan PDRB berbanding dengan naiknya pertumbuhan ekonomi, sehingga kemakmuran masyarakat juga akan bertambah. Ketika kemakmuran masyarakat bertambah maka akan menyebabkan banyaknya atau tersedianya lowongan pekerjaan Arsyad dalam Destiana & Prawoto, (2018).

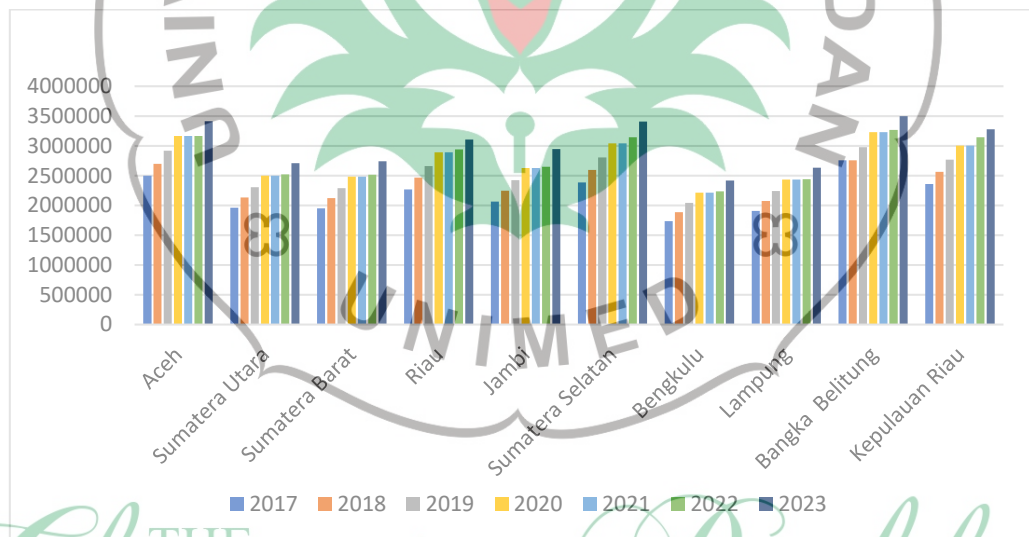
Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian terdahulu yang diteliti oleh Warapsari, dkk (2020) yang mana hasil dalam penelitian nya memperlihatkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang telah dikemukakan tersebut.

Selain PDRB, UMP juga merupakan indikator dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu dengan cara pemerintah melakukan pembenahan pada sistem pengupahan yang disesuaikan dengan penetapan pemerintah mengenai kebijakan upah minimum.

Menurut Pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik usaha untuk pekerja/buruh yang dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja. Upah juga berperan penting dalam ketenagakerjaan. Upah jika dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja yaitu, apabila upah semakin tinggi maka permintaan tenaga kerja semakin sedikit terhadap perusahaan, karena beban yang akan dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin bertambah dengan asumsi input lain tetap. Jika upah

semakin tinggi maka tenaga kerja yang ditawarkan semakin kecil sehingga penyerapan tenaga kerja akan berkurang Todaro, (2011).

Faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja berikutnya adalah Upah Minimum, permintaan kuantitas tenaga kerja akan menurun apabila permintaan upah meningkat, hal ini disebabkan apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Maka hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih murah Haryo Kuncoro, (2002).



Gambar 1.3 Upah Minimum di Provinsi Pulau Sumatera (Rupiah) Tahun 2017-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa UMP di Pulau Sumatera dari tahun 2017-2023 rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu pula UMP di masing-masing provinsi yang ada di Pulau Sumatera setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Upah minimum tertinggi berada di provinsi Bangka Belitung sebesar Rp.3.498.479 pada tahun 2023 hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah untuk

mensejahterakan masyarakat dan didorong oleh PDRB lapangan usaha pertanian yang ikut meningkat.

Dan upah minimum terendah berada pada provinsi Bengkulu sebesar Rp.1.737.413 pada tahun 2017 memang setiap tahunnya Upah Minimum di Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan namun jika dilihat dari Provinsi lainnya Provinsi Bengkulu merupakan Upah paling rendah di Pulau Sumatera bahkan di Indonesia hal ini disebabkan karena produktivitas tenaga kerja yang rendah serta kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu yang tidak ingin menaikkan upah terlalu tinggi karena mempertimbangkan inflasi yang ada.

Data tersebut menjelaskan bahwa UMP di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meningkat nya upah tersebut diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi ditemukan di dalam sebuah kasus, terjadinya dampak yang negatif yang mana apabila upah mengalami peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal tersebut dibuktikan dari sebuah penelitian oleh Rahayu (2019) yang menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan upah dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja, terutama di kalangan pekerja dengan produktivitas rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk setiap 1% kenaikan UMP, penyerapan tenaga kerja berkurang sebesar 0,144%. Penelitian ini juga serupa dengan pendapat Haryo Kuncoro (2001) dalam Dientje Rumerung, (2015) mengatakan bahwa kuantitas tenaga kerja yang diminta menurun sebagai akibat dari kenaikan upah yang merupakan reaksi pengusaha guna mempertahankan keuntungan maksimum.

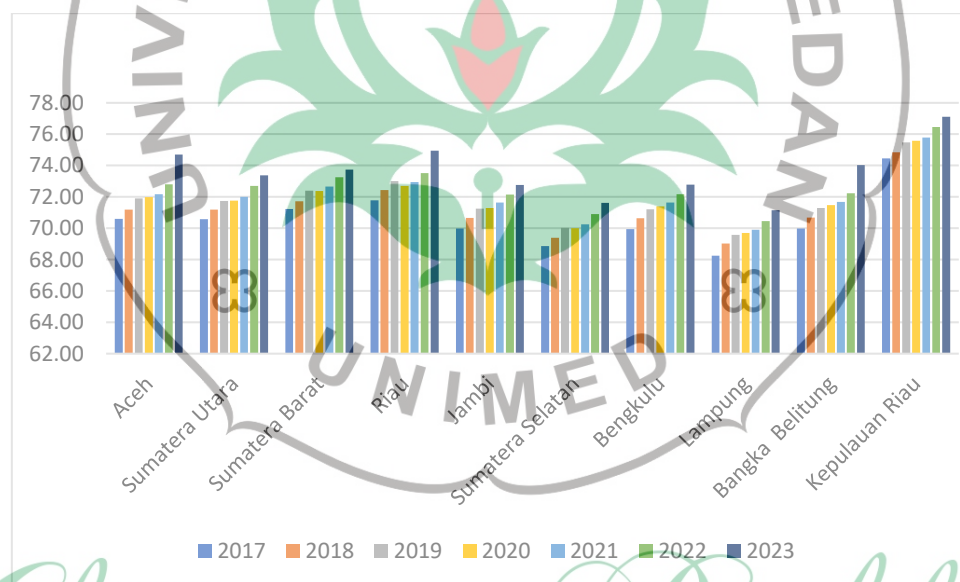
Hal tersebut diakibatkan apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih murah.

Kuncoro, (2002) berpendapat bahwa kenaikan upah dapat mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta, jika tingkat upah mengalami kenaikan sementara harga input lainnya tetap maka harga tenaga kerja tersebut cenderung lebih mahal dari input lain, sehingga dapat mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input lain yang tentu harganya lebih murah guna untuk mempertahankan keuntungan.

Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian terdahulu yang diteliti oleh Wihastuti & Rahmatullah, (2018) hasil dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa upah minimum provinsi di Pulau Jawa mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kuncoro (2002).

Faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja berikutnya adalah IPM, IPM berperan penting untuk mengukur dan melihat seberapa jauh pembangunan di suatu wilayah seperti pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Bila IPM di suatu wilayah tercapai itu disebabkan karena kualitas hidup masyarakat juga yang tercapai yang artinya pendapatan, kesehatan serta pendidikan yang tinggi yang juga berpengaruh pada terserapnya tenaga kerja di suatu wilayah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendapatkan pekerjaan yang layak yang artinya asset juga meningkat, Shafira (2020).

Selain indikator upah minimum, indeks pembangunan manusia juga merupakan indikator yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. IPM digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia yang dilihat dari tiga aspek dasar, yaitu tingkat pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup yang layak. Semakin tingginya kualitas hidup manusia maka akan menunjang peningkatan produktivitas barang dan jasa yang akan dihasilkan, dengan begitu semakin tinggi IPM akan mempengaruhi tenaga kerja dalam mencari pekerjaan.



Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Sumatera (Persen) Tahun 2017-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari gambar 1.4 menunjukkan bahwa setiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2023. IPM tertinggi berada pada provinsi Kepulauan Riau yaitu 77.11% pada tahun 2023 hal ini didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunannya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat melalui umur harapan hidup, pengetahuan dari harapan lama sekolah dan standar hidup layak yang diukur dari rata-rata pengeluaran per kapita.

Dan IPM terendah berada pada provinsi Lampung yaitu 68.25% pada tahun 2017 ini disebabkan oleh harapan hidup serta harapan pendidikan yang rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa adanya tingkat kesejahteraan yang ikut meningkat.

Apabila tenaga kerja sudah memiliki produktivitas tinggi maka ia mampu menciptakan barang produksi yang semakin melimpah. Ketika mendapatkan lebih banyak output, produksi meningkat, pendapatan meningkat, dan konsumsi juga meningkat. Teori ini didukung oleh penelitian Rahmadani dkk (2021), yang menyatakan bahwa kenaikan 1% dalam IPM akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Artinya apabila IPM semakin meningkat maka penyerapan tenaga kerja semakin banyak juga. Begitupun juga sebaliknya apabila IPM semakin rendah maka penyerapan tenaga kerja juga ikut menurun.

Mulyadi Subri, (2003) mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki Pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui keahliannya berkreaitivitas dan mengembangkan ide-ide yang sudah ada. Tingkat Pendidikan yang semakin meningkat berdampak pada pengetahuan masyarakat dan keahlian masyarakat

yang meningkat sehingga meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Produktivitas yang tinggi akan menghasilkan tenaga kerja dengan kualitas yang bagus. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, dan perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Sehingga semakin tinggi ipm maka akan meningkatkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yuliathinerda, (2019) hasil dalam penelitian nya memperlihatkan bahwa IPM dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Barat mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang telah dikemukakan tersebut.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, tidak lepas dari tenaga kerja yang dimilikinya. Banyaknya tenaga kerja yang ada di Indonesia tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diuraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak seimbangnya peningkatan angkatan kerja dengan permintaan tenaga kerja, yang mana angkatan kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja.
2. PDRB di beberapa provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2020 mengalami perlambatan.

3. UMP di setiap provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan setiap tahun, kenaikan upah dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, akan tetapi hal tersebut dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja.
4. IPM mengalami peningkatan setiap tahun, nilai IPM yang tinggi menggambarkan pembangunan kualitas hidup yang baik. Keadaan tersebut seharusnya menempatkan posisi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran ikut menurun, namun pada kenyataannya tidak terjadi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan penetapan pembatasan dari masalah penelitian yang akan diidentifikasi. Dengan kata lain pembatasan masalah adalah lingkup masalah yang akan diteliti. Maka dari itu untuk menghindari penyimpangan dari pokok permasalahan. Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka diperlukannya pembatasan masalah agar penelitian lebih berfokus, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Periode penelitian yaitu pada tahun 2017-2023.
2. Ruang lingkup permasalahan penelitian terkait penyerapan tenaga kerja dibatasi hanya pada PDRB, UMP, dan IPM di provinsi-provinsi yang ada di pulau Sumatera.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Sumatera?
2. Apakah terdapat pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Sumatera?
3. Apakah terdapat pengaruh IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Sumatera?
4. Apakah terdapat pengaruh secara bersamaan PDRB, UMP, dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Sumatera?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersamaan PDRB, UMP, dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Sumatera.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu memperluas wawasan pengetahuan serta sebagai landasan bagi penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan tolak ukur bagi pemerintah dalam pertimbangan serta evaluasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah terkhususnya tentang PDRB, UMP, dan IPM yang berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkaitan dan berkepentingan, serta hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut.

THE
Character Building
UNIVERSITY